LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)

KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
KATA PENGANTAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang **1**
2. Landasan Hukum **2**
3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi **3**
4. Isu isu Strategis (*Strategic issued*) yang Sedang dihadapi **11**
5. Sistematika Penulisan **13**
BAB II PERENCANAAN KINERJA 14
2.1 Iktisar/ringkasan Renstra/Renja **14**
2.2 Perjanjian Kinerja **17**
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
A. Capaian Kinerja Organisasi **20**
A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPD 2024 – 2026 dan RPJMD 2025-2029 22
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya 29
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra 34
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan) 42
A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 46
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 51
A.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja 54
BAB IV PENUTUP 98
4.1 Kesimpulan **98**
4.2 Saran **100**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Prambon 2025. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2025 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Dokumen LKJIP ini menyaksikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2025 serta Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Prambon dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya Tujuan dan Sasaran organisasi Kecamatan Prambon. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak – pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Prambon, 13 Maret 2026
Camat Prambon,



WISNU PRAWOKO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP.198705042006021001

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Prambon Tahun 2025 yang diharapkan dapat

memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Prambon bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk mengacu kepada *Review* Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Prambon merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian Sasaran strategis yang berupa *outcome* (hasil) ataupun *impact* (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/03/K/411.515/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dan perubahannya.

3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

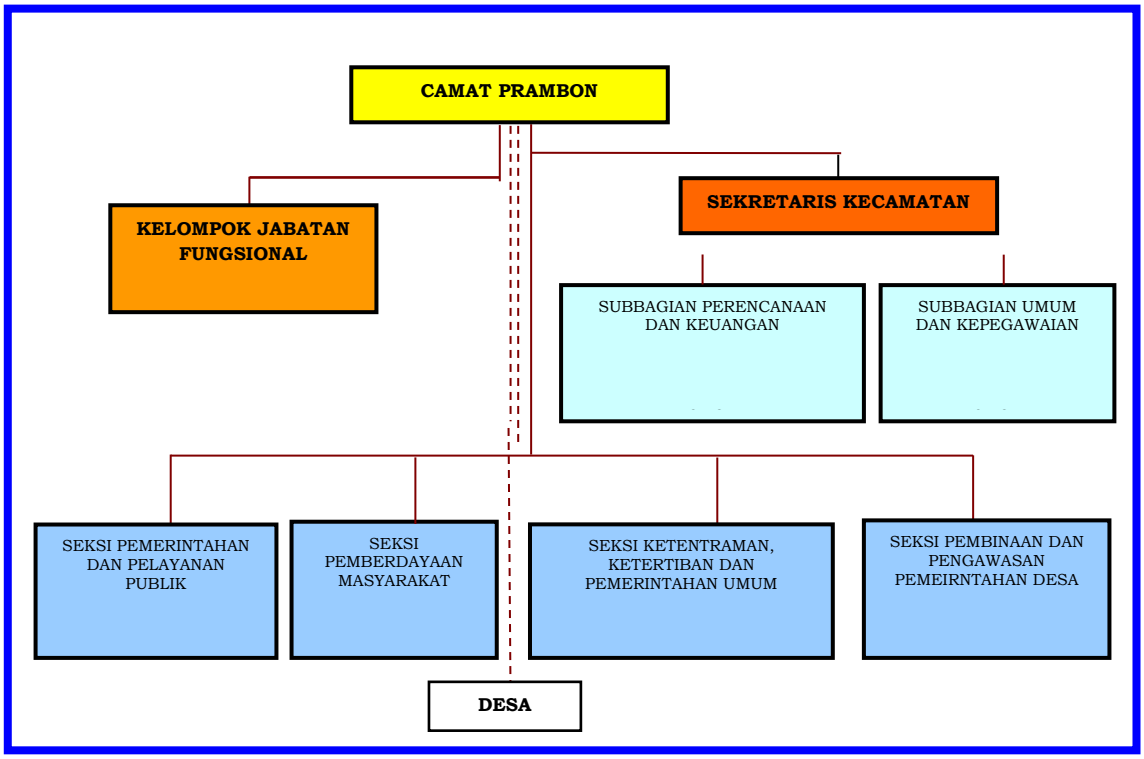
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokok Kecamatan Prambon adalah :

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. menggordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dn/atau kelurahan;
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Struktur Organisasi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan;
c. 2 dua) Subbag yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
d. 4 (empat) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Gambar 1.1 Struktur Kecamatan Prambon



a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;

h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi. Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan

g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakanpengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

d. melaksanakanfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Prambon adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Prambon sebanyak (sembilan), yang terisi sebanyak 9 (sembilan) dan dibantu oleh 6 (enam) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Prambon

Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	3
4.	Kasubbag	2
5.	Staf/PNS	4
6.	PPPK	1
7.	PPPK PARUH WAKTU	5
8.	THL	1
Jumlah		18

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Prambon sebagai berikut :

Tabel 1.2

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Prambon

Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	0
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	4
4.	Penata	III/c	0
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
6.	Penata Muda	III/a	3
7.	Pengatur Tk,I	II/d	0
8.	Pengatur	II/c	1
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	0
10	Pengadministrasi Perkantoran	V	1

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
11	Operator Layanan Operasional		5
12.	-		1
Jumlah			18

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Prambon dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 1.3

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Prambon Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	3
2.	S1	6
3.	D-IV	0
4.	D-III	0
5.	SMA	9
6.	SMP	0
Jumlah		18

4. Isu isu Strategis (*Strategic issued*) yang Sedang dihadapi

Isu-isu strategis yang tertuang pada Renstra tahun 2024 maupun tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Isu Strategi Renstra 2024-2026

Pada periode transisi ini, isu strategis difokuskan pada penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk dan penanganan dampak pasca-pandemi serta regulasi baru. Isu-isu utamanya meliputi:

a. Penyelarasan Program Prioritas Nasional: Menyesuaikan program kerja kecamatan dengan target RPJMN 2020-2024.
b. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik: Melakukan evaluasi terhadap capaian *outcome* pelayanan dari tahun-tahun sebelumnya (hingga 2022)

untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal sesuai standar minimal.

c. Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi): Penajaman isu strategis yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan.
d. Adopsi Regulasi Baru: Penyesuaian tata kelola pemerintahan dengan aturan terbaru seperti UU Cipta Kerja dan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

2. Isu Strategis Renstra 2025-2029

Untuk periode lima tahun penuh ini, isu strategis lebih diarahkan pada visi jangka panjang dan respon terhadap dinamika masyarakat yang kompleks. Isu-isu yang tertuang meliputi:

a) **Tuntutan Pelayanan Prima (Good Governance):** Besarnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel di tingkat kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan.
b) **Kompleksitas Masalah Sosial-Ekonomi:** Menghadapi tingginya heterogenitas masyarakat (perbedaan pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan ekonomi) di 14 desa wilayah Kecamatan Prambon.
c) **Pemanfaatan Potensi Wilayah:** Mengoptimalkan lokasi strategis Kecamatan Prambon yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri untuk sektor pertanian, perdagangan, dan konektivitas antar-daerah.
d) **Digitalisasi dan Sistem Informasi:** Implementasi penuh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran.
e) **Sinergitas Kewilayahan:** Memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan 14 desa di bawahnya (seperti Desa Baleturi, Sonoageng, hingga Watudandang) untuk mencapai target pembangunan daerah.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen LKJIP Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- 1.4. Isu Isu Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
- 2.1 Iktisar/ringkasan Renstra/Renja
- 2.2 Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.
  - A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun-tahun Sebelumnya.
  - A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra.
  - A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standart Nasional.
  - A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.
  - A.6 Analisis Pengguna Sumber Daya
  - A.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan.
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Iktisar/ringkasan Renstra/Renja

a. Tujuan RPD Kabupaten Nganjuk 2024-2026 yaitu, “Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel” kemudian di intervensi oleh Kecamatan Prambon dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan”, adapun sasaran yang akan dicapai pada Renstra 2024-2026 sebagaimana telah dilakukan pengendalian dan evaluasi melalui dokumen Dalev Renstra 2024-2026 dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

(Tujuan dan Sasaran Kecamatan Prambon)

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	78
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target 2025**
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	90
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	30

b. Tujuan RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 yaitu, “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah” kemudian di intervensi oleh Kecamatan Prambon dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan”, “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan”, dan “Meningkatnya tertib administrasi desa Desa” dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

(Tujuan dan Sasaran Kecamatan Prambon)

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	75,45
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target 2025**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	90,97 Indeks
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	10%
Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi desa	90%

c. Definisi Operasional Tujuan dan Sasaran

Untuk Tujuan dan Sasaran pada renstra 2024-2026 dan renstra 2025-2029 secara definisi dan formulisinya sama, hanya berbeda penulisan pada tujuan dan sasarannya, kemudian pada 2025-2029 tambah satu sasaran yakni Meningkatnya tertib administrasi desa Desa.

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan memiliki definisi operasional : Penilaian Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan difokuskan pada bidang kreativitas yaitu: (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Pelaksanaan Tugas Atributif; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Tata Kelola Kecamatan; dan (5) Inovasi, dan (6)Tugas Lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan Formulasi perhitungan : Formulasi : Indeks sinergitas kecamatan dihitung dari rata-rata indikator penilaian yang mencakup (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Pelaksanaan Tugas Atributif; (5) Inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian; (6)Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan; (7) Pelaksanaan Tugas Lainnya.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan memiliki definisi operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Dengan Formulasi IKM adalah nilai rata-rata untuk komponen (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan; (6) Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (9) Sarana dan Prasarana.

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan memiliki definisi operasional : Penurunan gangguan trantibum adalah selisih jumlah gangguan trantibum dengan jumlah gangguan trantibum pada tahun

sebelumnya. Dengan formulasi : Perbandingan dari jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %. Meningkatnya tertib administrasi desa Desa kecamatan memiliki definisi operasional : Syarat-syarat/kirteria desa tertib administrasi desa yaitu : 1. Buku Admnistrasi Umum; 2. Buku Administrasi Penduduk; 3. Buku Administrasi Keuangan; 4. Buku Administrasi Pembangunan; 5. Buku Administrasi Lainnya. Dengan formulasi : Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%.

2.2 Perjanjian Kinerja

a. PK mandat RPD 2024-2026

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan kecKecamatan	78
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Adminstrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	90
Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	30

Adapun Program beserta Penganggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.868.602.231	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	128.593.900	APBD 2025
3	Program Pemberdayaan	66.687.950	APBD 2025

	Masyarakat Desa dan Kelurahan		
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	51.955.700	APBD 2025
No.	**Program**	**Anggaran (Rp)**	**Keterangan**
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	86.545.350	APBD 2025
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	246.833.200	APBD 2025
JUMLAH		3.449.217.331331	

b. PK target baru dari RPJMD 2025-2029

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	75,45
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	90,97
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10
4.	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	90

Adapun Program beserta Penganggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.811.784.329,00	PAPBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	66.591.369,00	PAPBD 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	64.842.950,00	PAPBD 2025
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	51.055.700,00	PAPBD 2025
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	86.545.350,00	PAPBD 2025
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	226.208.200,00	PAPBD 2025
JUMLAH		3.307.027.898,00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Prambon merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Prambon untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria **SMART** sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu). Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2025, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Prambon menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran kinerja sasaran strategis

No	Interval Nilai Capaian	Kriteria
1	≥ 90%	Tercapai
2	80% ≥90 %	Tercapai dengan catatan
3	≥ 80%	Tidak tercapai

Sumber: Surat Sekretaris Daerah Tanggal 02 Februari 2026 No. 000.8.6.3/304/311.000/2026 hal. Revisi SE

Penyusunan LKJIP TA. 2025

Capaian kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yangmenunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPD 2024 – 2026 dan RPJMD 2025-2029

a) Berdasarkan RPD 2024 – 2026

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Prambon dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Renstra 2024-2026	78	75,45	96.73%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	Renstra 2024 - 2026	90	89,67	99,63
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Renstra 2024 - 2026	30	41,30 %	137,67 %

b) Berdasarkan RPJMD 2025 – 2029

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Prambon dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER PERENCANAAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2025 - 2029	75,45	85,14	112,84
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	Renstra 2025 - 2029	90,97	92,86 Indeks	102,08
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di	Renstra 2025 - 2029	10	-26.08%	-260,8%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER PERENCANAAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN (%)
		wilayah kecamatan				
4	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025 - 2029	90	100%	111,11 %

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kecamatan Prambon sebagaimana telah dilakukan Pengendalian dan Evaluasi Renstra 2024-2026 serta merujuk pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan Bupati Nganjuk Tahun 2025, terdapat 1 (Satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Capaian dari Tujuan sebesar 96,73% ini didapat dari hasil penilaian Sinergitas Kecamatan sebagaimana surat dari Sekretariat Daerah No. 100/2820/411.000/2024 dengan nilai 75,45 dari target 78. dimana Kecamatan Prambon berada di peringkat ke 6 dari 20 nomor. Karena cut off dari PK 2025 ke PK perubahan 2025 itu bulan September, sehingga untuk nilai yang dipakai masih mengacu pada nilai tahun sebelumnya. Untuk tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan sudah mencapai target baik di renstra 2025-2029, tetapi belum mencapai target pada periode renstra 2024-2025.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di dapatkan nilai 89,67 penilaian masyarakat dari aplikasi e-SUKMA dengan

Mutu Pelayanan B (Baik). Dari 9 Unsur yang ada dari U1 sampai dengan U9 nilai yang di dapat pada masing-masing unsur

No	Nama Unsur	Nilai
1	U1 = Persyaratan	84,77
2	U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur	84,44
3	U3 = Waktu Penyelesaian	82,45
4	U4 = Biaya/Tarif	93,87
5	U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	83,77
6	U6 = Kompetensi Pelaksana	84,6
7	U7 = Perilaku Pelaksana	84,93
8	U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	95,53
9	U9 = Sarana dan Prasarana	83,94

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah.

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut
1	U1 (Persyaratan)	Sehubungan dengan dilaksanakan survey kepuasan Masyarakat melalui aplikasi sukma e jatim di Kecamatan Prambon, ada beberapa harapan dari responden sebagi pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan dikemudian hari.

2	U2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sarana dan Prasarana akan di perbakin lagi terhadap Masyarakat sesuai dengan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
3	U5 (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan)	Pelayanan di Kecamatan Prambon pada tahun yang akan dating berusaha mempertahankan dan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap Masyarakat

Untuk sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sudah mencapai target pada rensta 2024-2026 mendapatkan nilai 90 dan renstra 2025-2029 mendapatkan nilai 89,67.

3. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan mendapatkan capaian 41,30%. Terdapat penurunan pelanganggaran trantibum yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yakni dari 58 kejadian pelanggaran trantibum di tahun 2024, di tahun 2025 menurun menjadi 27 kejadian pelanggaran trantibum dimana terdapat penurunan trantibum sebanyak 31 kejadian berdasarkan data laporan Tribulan 3 bulan september. Ini didapat dari Laporan hasil Koordinasi dari FORPIMCAM, masyarakat dan patroli Trantibum. Sebagaimana formulasi

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan (n-1) – tahun (n)}}{\text{Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan (n-1)}} \text{ X100\%}$$

kemudian dari hasil ini disandingkan dengan target 30 kemudian dicapailah capaian sebesar 137,67%. Pada tahun selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang terkait penargetannya karena hasil capaian lebih dari 30%.

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Prambon serta merujuk pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan Bupati Nganjuk Tahun 2025, terdapat 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Sinergitas Kecamatan

Capaian dari Tujuan sebesar 112,84 % ini didapat dari hasil penilaian Sinergitas Kecamatan sebagaimana surat dari Sekretariat Daerah No. 100/3889/411.000/2025 dengan nilai 85.14 dari target 75.45.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan di dapatkan nilai 92,86 dari penilaian masyarakat dari aplikasi e-SUKMA dengan Mutu Pelayanan A (Sangat Baik) dari target 90,97. Dari 9 Unsur yang ada dari U1 sampai dengan U9 nilai yang di dapat pada masing-masing unsur

No	Nama Unsur	Nilai
1	U1 = Persyaratan	91,97
2	U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur	91,37
3	U3 = Waktu Penyelesaian	90,73
4	U4 = Biaya/Tarif	93,66
5	U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	91,26
6	U6 = Kompetensi Pelaksana	91,84
7	U7 = Perilaku Pelaksana	91,67
8	U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	98,00
9	U9 = Sarana dan Prasarana	78,52

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan mendapatkan capaian -260,8%. Terdapat kenaikan kasus pelanganggaran trantibum yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yakni dari 46 kejadian pelanggaran trantibum di tahun 2024, di tahun 2025 meningkat menjadi 58 kejadian pelanggaran trantibum dimana terdapat kenaikan sebanyak 12 kejadian. Ini didapat dari Laporan hasil Koordinasi dari FORPIMCAM, masyarakat dan patroli Trantibum. Sebagaimana formulasi

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan (n-1) – tahun (n)}}{\text{Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan (n-1)}} \text{ X100\%}$$

kemudian dari hasil ini disandingkan dengan target 10 kemudian dicapailah capaian sebesar -260.08%. Pada tahun selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang terkait penargetannya karena hasil capaian kurang dari 10%.

3. Meningkatnya tertib administrasi desa

Sasaran Meningkatnya tertib administrasi desa Desa mendapatkan capaian 106,48%. Dimana dari ke 14 desa di kecamatan prambon sudah tertib dalam pengerjaan administrasi desa.

No	Desa	Buku Administrasi yang terisi				Jumlah	Nilai	Kategori
		Administrasi Umum Desa	Administrasi Kependudukan	Administrasi Keuangan	Administrasi Pembangunan			
1	Gondanglegi	8	4	6	4	22	91.6%	Sangat Tertib
2	Singkalanyar	9	5	6	4	24	100%	Sangat Tertib
3	Mojoagung	9	5	6	4	24	100%	Sangat Tertib
4	Bandung	9	5	6	4	24	100%	Sangat Tertib
5	Baleturi	9	5	6	4	24	100%	Sangat Tertib
6	Nglawak	8	4	6	4	22	91.6%	Sangat Tertib
7	Rowoharjo	9	5	6	4	24	100%	Sangat Tertib
8	Sugihwaras	9	5	6	3	23	95.8%	Sangat Tertib
9	Tegaron	8	5	6	4	23	95.8%	Sangat Tertib
10	Tanjungtani	9	5	6	4	24	100%	Sangat Tertib
11	Sanggrahan	9	4	6	4	23	95.8%	Sangat Tertib
12	Watudandang	9	3	5	3	20	83.3%	Tertib
13	Sonoageng	9	4	6	3	22	91.6%	Sangat Tertib
14	Kurungrejo	9	4	6	4	23	95.8%	Sangat Tertib
Total						322	95.83 %	Sangat Tertib

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	88	77	78	85,35 Indeks	75,45 Indeks	75,45 Indeks
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	84	88	90	84,71 Indeks	90,97 Indeks	89,67 Indeks
3	Meningkatkan Ketentraman dan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan	Renstra 2024-2026	n/a	25	30	-	58,33	41.30 %

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
	Ketertiban di Wilayah Kecamatan	ketertiban umum di wilayah kecamatan							
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 20254-2029	88	73,59	75,45	85,35	75,45	85,14
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 20254-2029	84	90,97	90,97	84,71	90,97	92,86
3	Meningkatnya ketentraman dan	Persentase penurunan gangguan ketentraman	Renstra 20254-2029	n/a	10	10	-	58,33 %	-26.08 %

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
	ketertiban umum di kecamatan	dan ketertiban umum di kecamatan							
4	Meningkatnya tertib administrasi desa Desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	Renstra 20254-2029	n/a	83,3	90	-	92,86 %	100%

Berdasarkan renstra 2024-2026 untuk tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan Realisasi tahun 2025 sebesar 75,45 , sama dengan capaian tahun 2024 (75,45) (dikarenakan cut off untuk renstra 2024-2026 itu pada bulan September, sedangkan nilai sinergitas keluar pada bulan Nopember) dan lebih rendah dibanding tahun 2023 (88). Jika dibandingkan dengan target 2025 sebesar 75,45, maka capaian tahun 2025 belum memenuhi target.

Berdasarkan renstra 2024-2026 untuk sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Realisasi tahun 2025 sebesar 89,67. Terjadi tren perbaikan kualitas pelayanan setelah penurunan pada 2024. Upaya evaluasi dan peningkatan standar pelayanan pada PATEN menunjukkan hasil positif di tahun 2025.

Berdasarkan renstra 2024-2026 untuk sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Tahun 2024 menunjukkan capaian 58,33%, sedangkan tahun 2025 menurun signifikan menjadi 41,30% dibanding target 2025 sebesar 30%, realisasi tahun 2025 jauh melampaui target. Terjadi lonjakan perbaikan yang sangat signifikan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan efektivitas langkah preventif, pengawasan, serta koordinasi dengan unsur keamanan diwilayah kecamatan Prambon.

Berdasarkan renstra 2025-2029 untuk tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Realisasi tahun 2025 sebesar 85,14, meningkat dibanding tahun 2024 (75,45) dan juga lebih tinggi dari tahun 2023 (85,35). Dibanding target tahun 2025 sebesar 75,45, capaian 2025 melampaui target secara signifikan. Pada indikator ini terlihat adanya peningkatan kualitas sinergitas yang kuat pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan konsolidasi internal dan kolaborasi eksternal berjalan lebih optimal dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan renstra 2025-2029 untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Realisasi IKM pada tahun 2025 sebesar 92,86, mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 yang sebesar 90,97. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik setelah terjadi

penurunan dari tahun 2023 (84,71) ke tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 90,97, maka capaian tahun 2025 melampaui target. Walaupun belum kembali menyamai capaian tertinggi tahun 2023, tren tahun 2025 menunjukkan pemulihan dan perbaikan kualitas layanan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2025 menunjukkan tren positif dalam kepuasan masyarakat. Perbaikan ini mengindikasikan adanya tindak lanjut evaluasi pelayanan pada tahun 2024 sehingga kualitas layanan kembali meningkat.

Berdasarkan renstra 2025-2029 untuk sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pada tahun 2025 terjadi capaian sebesar -26,08%, yang menunjukkan adanya peningkatan gangguan dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan renstra 2025-2029 untuk sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Desa Realisasi tahun 2024 mencapai 99.69%, sedangkan tahun 2025 meningkat menjadi 100%.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.3
Target Kinerja Renstra 2024 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN - RENSTRA 2024-2026 – RENSTRA 2025-2029	TARGET RENSTRA TAHUN 2024 - 2026						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Dokumen Renstra 2024 - 2026	77	78	79	-	-	-	-
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**DASAR DOKUMEN**	**TARGET RENSTRA TAHUN 2024 - 2026**						
				2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen Renstra	88	90	92	-	-	-	-

	n Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	(IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	2024 - 2026							
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Dokumen Renstra 2024 - 2026	25	30	35	-	-	-	-

Tabel 3.1.3.2
Target Kinerja Renstra 2025 - 2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	DASAR DOKUMEN	TARGET RENSTRA TAHUN 2025 - 2029						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Dokumen Renstra 2025 – 2029	75,45	75,45	77	76	79	79	79
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**DASAR DOKUMEN**	**TARGET RENSTRA TAHUN 2025 – 2029**						
				2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Dokumen Renstra 2025 – 2029	90,97	90,97	91,5	92,3	92,97	93	93,97

2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Dokumen Renstra 2025 - 2029	10	10	10	11	11	12	14
3	Meningktanya tertib administrasi desa	Presentase Desa tertib Administrasi desa	Dokumen Renstra 2025 - 2029	83,3	90	90	95	95	95	95

Terdapat penyesuian target renstra 2024-2026 pada Dalev Renstra per tanggal 31 desember 2024, dimana target Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan sebelumnya di nilai terlalu rendah, dan target sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan terlalu tinggi untuk dicapai. Adapun Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2024 - 2026 dengan Target Akhir Renstra

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN	TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	79 Indeks	75,45 Indeks	95,51
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**DOKUMEN PERENCANAAN**	**TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA**	**REALISASI KINERJA TAHUN 2025**	**TINGKAT KEMAJUAN (%)**
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu	Renstra 2024-2026	92 Indeks	89,67 Indeks	97,47

	Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan (PATEN)				
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Renstra 2024-2026	35	41,30 %	137,67

Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029 dengan Target Akhir Renstra

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN	TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	79 Indeks	85,14 Indeks	107,77%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN	TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2025-2029	93,97 Indeks	92,86	98,82%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Renstra 2025-2029	14	-26,08	-186,28%
3	Meningkatkan tertib administrasi Desa	Presentase tertib administrasi desa	Renstra 2025-2029	95	100%	105,26%

Berdasarkan renstra 2024-2026 dari 3 sasaran strategis di akhir renstra 2024-2026 hanya sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang belum mencapai target dari akhir renstra. Untuk sinergitas

sudah mencapai target karena *cut off* pada bulan September, sehingga penilaian belum turun, dan memakai nilai tahun 2024. Jika mengacu pada penilaian sinergitas tahun 2025 yang keluar pada bulan 28 Nopember, sudah melebihi dari target akhir renstra.

Untuk sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini memang adanya tiga unsur pelayanan yang masih dalam kategori tiga terbawah yaitu unsur U1 (Persyaratan), U5 (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan), dan U9 (Sarana dan Prasarana), dimana untuk tahun selanjutnya akan diadakan evaluasi terkait peningkatan pelayanan pada unsur tersebut.

Kemudian berdasarkan renstra 2025-2029 dari 4 sasaran strategis yang sudah mencapai target dari akhir renstra yaitu Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dimana kinerja kecamatan pada tahun 2025 terbilang baik karena mendapat ranking 3 terbesar dari 20 kecamatan yang ada pada Kabupaten Nganjuk. Kemudian Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan. Tetapi ini menjadi acuan untuk dapat menurunkan kejadian trantibum di wilayah kecamatan, dikarenakan trantibum merupakan hal yang tidak dapat diprediksi kejadiannya, tetapi dapat diminimalisir dengan kegiatan yang sudah ada yakni koordinasi, pembinaan wasbang, dan inovasi patrol trantibum. Dan akan dilakukan evaluasi ulang pada target yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang pada target sasaran strategis yang telah ditentukan.

Kemudian pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan akan menjadi motivasi untuk terus dapat meningkatkan pelayanan publik terutama pada unsur U1 (Persyaratan), U5 (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan), dan U9 (Sarana dan Prasarana) karena dari semua unsur, tiga unsur tersebutlah yang harus lebih di utamakan pada tahun selanjutnya untuk diadakan evaluasi terkait peningkatan pelayanan publik.

Dan untuk Meningkatnya tertib administrasi desa Desa sudah mencapai 100%. Dimana 14 desa sudah melaksanakan tertib administrasi desa.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan)

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional (Berdasarkan RPD 2024-2026)

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	STANDART NASIONAL/ PROVINSI	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	POSISI KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	86,70 Indeks	75,45 Indeks	Dibawah
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**STANDART NASIONAL/ PROVINSI**	**REALISASI KINERJA TAHUN 2025**	**POSISI KINERJA**
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	88,39 Indeks	89,67 Indeks	Diatas
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	100	41,30%	Dibawah

Sumber data :

a. Surat Sekda Kabputen Nganjuk No. 100/2820/411.000/2024 tetang Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas
b. Website https://sukma.jatimprov.go.id/

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional (Berdasarkan RKPD 2025-2029)

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	STANDART NASIONAL/ PROVINSI	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	POSISI KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	90.80 Indeks	85,14 Indeks	Dibawah
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**STANDART NASIONAL/ PROVINSI**	**REALISASI KINERJA TAHUN 2025**	**POSISI KINERJA**
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	89,56 Indeks	92,86 Indeks	Diatas
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	100%	-26.08%	Dibawah
3	Meningkatnya tertib administrasi Desa	Presentase Desa tertib administrasi	100	100%	Setara

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Prambon sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja sinergitas Kecamatan Prambon Tahun 2025 dengan kecamatan lain di kabupaten Nganjuk, dengan Kecamatan Ngluyu 87,08 dan kecamatan Ngetos 90.80. dari kedua perbandingan tersebut masih belum mencapai standard 2 kecamatan di Kabupaten Nganjuk.

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Prambon sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2025 dengan standar Provinsi Jawa Timur, dengan perbandingan 89,67 (renstra 2024-2026) dan 92,86 (renstra 2025-2029). Maka dengan perbandingan tersebut, Kecamatan Prambon sudah mencapai rata-rata IKM Provinsi. Selanjutnya kinerja pelayanan harus ditingkatkan lagi untuk dapat mempertahankan nilai rata-rata Provinsi di tahun selanjutnya.

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Prambon sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2025 dengan standar LKJIP Kecamatan Lumajang, dengan perbandingan 41,30% (renstra 2024-2026) dan -26,08 (renstra 2025-2029). Maka dengan perbandingan tersebut, Kecamatan Prambon belum mencapai nilai standart nasional. Selanjutnya kinerja pelayanan harus ditingkatkan lagi untuk dapat mempertahankan nilai di tahun selanjutnya.

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Tertib administrasi Desa di wilayah Kecamatan Prambon sampai dengan Tahun 2025 dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2025 dengan standar LKJIP Kecamatan Lumajang, 100 (renstra 2025-2029). Maka dengan perbandingan tersebut, Kecamatan Prambon mencapai nilai setara standart nasional. Selanjutnya kinerja pelayanan harus ditingkatkan lagi untuk dapat mempertahankan nilai di tahun selanjutnya.

A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)	FAKTOR PENDUKUNG ATAU PENGHAMBAT	ALTERNATIF SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	78	75,45	96,73	1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis 2. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum Optimal.	Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)	FAKTOR PENDUKUNG ATAU PENGHAMBAT	ALTERNATIF SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Prambon
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	90	89,67	99,63%	1. keterbatasan Sdm yang ada belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal	Aparat Kecamatan bekerja secara profesional,memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)	FAKTOR PENDUKUNG ATAU PENGHAMBAT	ALTERNATIF SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							sesuai tugas dan fungsi	kepada masyarakat.
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Renstra 2024-2026	30%	41,30%	137,67	Rendahnya Wawasan kebangsaan dan toleransi di sebagian lingkungan Masyarakat	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum dengan Forpimcam berjalan cukup baik dan sinergis
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	75,45	85,14	112,84		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)	FAKTOR PENDUKUNG ATAU PENGHAMBAT	ALTERNATIF SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2025-2029	90,97	92,86	102,08		
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Renstra 2025-2029	10	-26,08%	-260,8%		
4.	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	Renstra 2025-2029	90	100	111,11%		

Secara keseluruhan, laporan kinerja Kecamatan Prambon tahun ini mencerminkan dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan publik, di mana mayoritas indikator sasaran strategis berhasil terealisasi dengan capaian melampaui 100%. Keberhasilan ini merupakan buah dari transformasi digital pada layanan administrasi dan penguatan sinergi di tingkat desa yang mampu menggerakkan roda ekonomi lokal secara efektif. Namun, di tengah tren positif tersebut, sektor ketentraman dan ketertiban umum menghadapi tantangan tersendiri dengan meningkatnya frekuensi kejadian gangguan keamanan setiap tahunnya. Fenomena ini tidak dipandang sebagai kegagalan administratif, melainkan sebagai implikasi logis dari dinamika pertumbuhan wilayah yang kian kompleks. Oleh karena itu, Kecamatan Prambon berkomitmen untuk menjadikan data peningkatan kejadian tersebut sebagai landasan penguatan mitigasi dan kolaborasi lintas sektor, guna memastikan bahwa pertumbuhan pembangunan tetap berjalan selaras dengan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	75,45	54,59	20,86 %
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	89,67	54,59	35,08 %
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Renstra 2024-2026	75	54,59	20,41 %
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	85,14	84,70	0,44%
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Renstra 2025-2029	92,86	84,70	8,16%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6	7
	n Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	(IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)				
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Renstra 2025-2029	-26,08	84,70	-110.78 %
4	Meningkatnya tertib administrasi Desa	Presentase Desa tertib administrasi	Renstra 2025-2029	100	84,70	15,%

Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis dengan membandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing sasaran strategis. Tingkat efisiensi mencerminkan kemampuan Kecamatan Wilangan dalam menghasilkan kinerja optimal dengan penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarana prasarana, dan waktu) secara hemat dan tepat sasaran, meskipun adanya pegawai yang pensiun dan jabatan kasubbag umum yang kosong.

Tingkat efisiensi pada Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan ini rendah karena *cut off* kinerja renstra 2024-2026 per bulan September, sehingga menggunakan realisasi tahun sebelumnya.

Dengan adanya kegiatan Patroli Gabungan dapat menambah capaian kinerja secara optimal meskipun adanya pengurangan pada anggaran kecamatan karena efisiensi.

Kemudian dengan anggaran yang ada, fasilitasi terhadap pembuatan dokumen administrasi desa kepada 14 desa yang ada juga telah tercapai dan sesuai target

pelaksanaan atau pengumpulan dokumen desa kecuali desa Sudimoroharjo yang belum tertib administrasi desa.

A.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.1.7

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Renstra 2024-2026			78	75,45	96,73%
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi	Renstra 2024-2026	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan	81	73,05	90,18%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
	Kecamatan (PATEN)	**Terpadu Kecamatan (PATEN)**						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	2	66,66%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	31	31	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
					Perangkat Daerah			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	1	50%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	9	75%
				Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	5	0	0%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pada Perangkat Daerah yang disediakan			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	3	75%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	39	30	76,92%
				PROGRAM PENYELENGGARA	**Persentase kegiatan**	**90%**	**89,67%**	**99,63%**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
				AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	9	75%
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan	Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat	12	6	50%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
				Sarana Pelayanan Umum	Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4	3	75%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam proses**	**88%**	**75%**	**85,23%**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
					pembangunan di wilayah Kecamatan Wilangan			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	2	2	100%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**87%**	**75%**	**86,21%**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
				PEMERINTAHAN DESA				
				Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	4	3	75%
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	**Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di**	**Renstra 2024-2026**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**30**	**41,30%**	**137,67%**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
		wilayah Kecamatan						
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraa	87%	87%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
					n pemerintahan di kecamatan			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Warga/Lembaga yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan	75	70	93,33%

Program kegiatan yang tercapai dan tidak tercapai pada renstra 2024-2026 dapat dilihat sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Tercapai**	-	-

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	2	3	4	5
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tidak Tercapai	Pengesahan renstra 2025-2029 pada bulan september	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapai	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tidak Tercapai	Pengesahan renstra 2025-2029 pada bulan september	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tidak Tercapai	Terjadi kesalahan dalam penargetan (terlalu besar)	Dilakukan penajaman dalam

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	2	3	4	5
				penargetan pada tahun selanjutnya
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tidak Tercapai	Target sampai akhir tahun. *Cut off* per bulan September. Jadi tidak tercapai. Pembelian pada bulan desember	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tidak Tercapai	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibuat di akhir tahun	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tidak Tercapai	Target sampai akhir tahun. *Cut off* per	-

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Urusan Pemerintahaan Daerah		bulan September. Jadi tidak tercapai. Pembelian pada bulan desember	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tercapai**	**-**	**-**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tidak Tercapai	Target sampai akhir tahun. *Cut off* per bulan September. Jadi tidak tercapai. pada bulan desember	-

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tidak Tercapai	Target sampai akhir tahun. *Cut off* per bulan September. Jadi tidak tercapai. pada bulan desember	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tidak Tercapai	Target sampai akhir tahun. *Cut off* per bulan September. Jadi tidak tercapai. Pembelian pada bulan desember	-
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tercapai Dengan Catatan**	Terjadi kesalahan dalam penentuan target	Dilakukannya pembenahan target pada tahun selanjutnya

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa	Tercapai	-	-
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tercapai Dengan Catatan (dari relaisasi 14 desa cepat berkembang / target 14 desa cepat berkembang x 100%=100%)**	**-**	**-**
	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tidak Tercapai	Target sampai akhir tahun. *Cut off* per bulan September. Jadi tidak tercapai. pada bulan desember	-

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	2	3	4	5
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tercapai (target dari 30% ter-realisasi 41,30%)**	**Terjadi kesalahan dalam penentuan target**	**Dilakukannya pembenahan target pada tahun selanjutnya**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tercapai	-	-
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tercapai**	**-**	**-**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tercapai	Target sampai akhir tahun. Cut off per bulan September. Jadi menggunakan	-

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	2	3	4	5
			realisasi tahun sebelumnya	

Tabel 3.8

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Renstra 2025-2029			75,45	85,14	112,84%
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu	Renstra 2025-2029	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan	81	73,05	90,18%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	**2**	**3**	**4**	**4**	**5**			**8**
		Kecamatan (PATEN)						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	3	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31	31	100%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	1	50%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	5	5	0%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	4	3	75%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
				Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	39	30	76,92%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang**	**90,97 %**	**92,86%**	**102,08%**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
				DAN PELAYANAN PUBLIK	**dilaksanakan dengan tertib**			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	9	75%
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan	Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait	12	6	50%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	**2**	**3**	**4**	**4**	**5**			**8**
				Sarana Pelayanan Umum	pemeliharaan sarana dan prasarana			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4	3	75%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**88%**	**75%**	**85,23%**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
				DESA DAN KELURAHAN	**dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Wilangan**			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	2	2	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	**2**	**3**	**4**	**4**	**5**			**8**
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**90%**	**100%**	**111,11%**
				Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	4	3	75%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	**Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**10**	**-26,08%**	**-260,8%**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	1	1	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
					dan Ketertiban Umum			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	87%	87%	100%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Warga/Lembaga yang mengikuti Pembinaan	75	70	93,33%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	4	5			8
				sesuai Penugasan Kepala Daerah	Wawasan Kebangsaan			

Program kegiatan yang tercapai dan tidak tercapai pada renstra 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tercapai**	-	**-**
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapai	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapai	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tidak Tercapai	Pengesahan renstra 2025-2029 pada bulan september	-

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	2	3	4	5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tidak Tercapai	Terjadi kesalahan dalam penargetan (terlalu besar)	Dilakukan penajaman dalam penargetan pada tahun selanjutnya
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tidak Tercapai	Target sampai akhir tahun. *Cut off* per bulan September. Jadi tidak tercapai. Pembelian pada bulan desember	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tidak Tercapai	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibuat di akhir tahun	-

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Tidak Tercapai	Target sampai akhir tahun. *Cut off* per bulan September. Jadi tidak tercapai. Pembelian pada bulan desember	-
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tercapai**	**-**	**-**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tidak Tercapai	Target sampai akhir tahun. *Cut off* per bulan September. Jadi tidak tercapai. pada bulan desember	-

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tidak Tercapai	Target sampai akhir tahun. *Cut off* per bulan September. Jadi tidak tercapai. pada bulan desember	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tidak Tercapai	Target sampai akhir tahun. *Cut off* per bulan September. Jadi tidak tercapai. Pembelian pada bulan desember	-
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tercapai**	-	-

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa	Tercapai	-	-
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tercapai**	**-**	**-**
	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tercapai		-
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tercapai**	**-**	**-**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Tercapai	-	-

No	Program/Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai	Faktor Penghambat	Upaya
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Ketentraman dan Ketertiban Umum			
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tercapai**	**-**	**-**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tercapai	-	-

Realisasi Anggaran

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**2,811,784,328.58**	**2,348,139,007.00**	463,645,322	83.51%
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	5,411,250.00	5,411,250.00	-	100%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,598,400.00	1,598,400.00	-	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,812,850.00	3,812,850.00	-	100%
5	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2,110,962,400.00	1,716,904,257.00	394,058,143.00	81.33%
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,104,026,000.00	1,710,200,257.00	393,825,743.00	81.28%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	3,517,600.00	3,350,000.00	167,600.00	95.24%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
	Keuangan Akhir Tahun SKPD				
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,418,800.00	3,354,000.00	64,800.00	98.10%
9	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	10,285,200.00	10,000,000.00	285,200.00	97.23%
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	0.00%
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,285,200.00	10,000,000.00	285,200.00	97.23%
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	140,817,219.58	129,447,965.00	11,369,254.58	91.93%
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,893,850.00	3,900,000.00	1,993,850.00	66.17%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,847,800.00	7,500,000.00	2,347,800.00	76.16%
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,346,624.00	35,735,254.00	2,611,370.00	93.19%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,970,625.58	4,411,711.00	1,558,914.58	73.89%
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35,952,440.00	34,025,000.00	1,927,440.00	94.64%
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41,998,180.00	41,376,000.00	622,180.00	98.52%
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,807,700.00	2,500,000.00	307,700.00	89.04%
21	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	99,276,159.00	92,083,400.00	7,192,759.00	92.75%
22	Pengadaan Mebel	-	-	-	0.00%
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,276,159.00	92,083,400.00	7,192,759.00	92.75%
24	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	47,185,000.00	28,460,666.00	18,724,334.00	60.32%
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,110,000.00	3,689,692.00	1,420,308.00	72.10%
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42,075,000.00	24,770,974.00	17,304,026.00	58.87%
26	**Pemeliharaan Barang Milik**	397,847,100.00	365,831,469.00	32,015,631.00	91.95%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59,674,800.00	40,000,000.00	19,674,800.00	67.03%
28	Pemeliharaan Mebel	10,800,000.00	10,500,000.00	300,000.00	97.22%
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,800,000.00	36,790,000.00	11,010,000.00	76.97%
30	Pemeliharaan/ Rehabil i tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279,572,300.00	278,541,469.00	1,030,831.00	99.63%
31	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**66,591,369.42**	**55,074,000.00**	11,517,369.42	82.70%
32	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	56,685,269.42	49,700,000.00	6,985,269.42	87.68%
33	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	56,685,269.42	49,700,000.00	6,985,269.42	87.68%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
34	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	5,923,700.00	3,256,000.00	2,667,700.00	54.97%
35	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5,923,700.00	3,256,000.00	2,667,700.00	54.97%
36	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	3,982,400.00	2,118,000.00	1,864,400.00	53.18%
37	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3,982,400.00	2,118,000.00	1,864,400.00	53.18%
38	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA**	**64,842,950.00**	**62,225,217.00**	2,617,733.00	95.96%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
	T DESA DAN KELURAHAN				
39	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	64,842,950.00	62,225,217.00	2,617,733.00	95.96%
40	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35,900,250.00	34,253,217.00	1,647,033.00	95.41%
41	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	28,942,700.00	27,972,000.00	970,700.00	96.65%
42	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**51,055,700.00**	**42,250,000.00**	8,805,700.00	82.75%
43	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	51,055,700.00	42,250,000.00	8,805,700.00	82.75%
44	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	51,055,700.00	42,250,000.00	8,805,700.00	82.75%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
45	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**86,545,350.00**	**79,178,400.00**	7,366,950.00	91.49%
46	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	86,545,350.00	79,178,400.00	7,366,950.00	91.49%
47	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	86,545,350.00	79,178,400.00	7,366,950.00	91.49%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
48	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**226,208,200.00**	**214,323,682.00**	11,884,518.00	94.75%
49	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	226,208,200.00	214,323,682.00	11,884,518.00	94.75%
50	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34,998,900.00	29,643,250.00	5,355,650.00	84.70%
51	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	164,409,200.00	162,326,182.00	2,083,018.00	98.73%
52	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	26,800,100.00	22,354,250.00	4,445,850.00	83.41%
TOTAL		**3.307.027.898**	**2.801.190.306**	**505.837.592**	**84,70%**

Capaian anggaran pada tahun 2025 mencapai 87,00% ada Program yang tidak terserap dan dibawah 90% yakni :

No	Program	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Prambon merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Prambon dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Prambon Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Prambon pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Sebagaimana realisasi pada kedua renstra sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Renstra 2024-2026	78	75.45	96.73%
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi	Renstra 2024-2026	90	89,67	99,63

	Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terpadu Kecamatan (PATEN)				
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	30	41,30%	137,67 %
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	75.45	85.14	112,84 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	90,97	92,86	102.08 %
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Renstra 2025-2029	10	-26,08	-260,8%
4	Meningkatnya tertib administrasi desa Desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	Renstra 2025-2029	90	100	111,11 %

dimana dalam renstra 2024-2026 untuk tujuan sudah tercapai pada data *cut off* pada bulan September, dan penilaian dilakukan pada bulan Nopember. Untuk 2 sasaran sudah mencapai target semua.

Sedangkan untuk renstra 2025-2029 untuk tujuan sudah tercapai, dan 2 sasaran sudah tercapai.dan 1 sasaran yang belum tercapai dikarenakan kejadian di tahun 2025 semakin bertambah.

4.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatk

an capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. melakukan re-orientasi terhadap program / kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen - dokumen perencanaan dan kinerja;
b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program / kegiatan;
c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Prambon secara menyeluruh,efektif, dan efesien;
d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.
e. mempertajam kembali dalam penargetan awal dalam renstra, agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat jauh dengan realisasi.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Prambon Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempunaan laporan kami pada tahun mendatang.

Prambon, 13 Maret 2026
Camat Prambon

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN PRAMBON

Wisnu Prawoko,S.STTP.,M.Si
Pembina
NIP. 19870504 200602 1 001

Lampiran Bukti Dukung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2**	**3**	**4**	**4**	**5**			**8**	**https://s.id/LKJIP2025KECPRAMBON**
1	**Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan**	**Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**	**Renstra 2025-2029**			**75,45**	**85,14**	**112,84%**	
	Meningkatkan kualitas	**Indeks Kepuasan Masyarak**	**Renstra 2025-2029**	**PROGRAM PENUNJ**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**81**	**73,05**	**90,18%**	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	**at (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**		**ANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	3	3	100%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perangkat Daerah	Daerah yang disusun				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31	31	100%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	1	50%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	5	5	0%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ah Daerah					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	3	75%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	39	30	76,92%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				g Urusan Pemerintahaan Daerah					
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**90,97%**	**92,86%**	**102,08%**	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	9	75%	
				Koordinasi Pemeliharaan Prasaran	Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat	12	6	50%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a dan Sarana Pelayanan Umum	Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana				
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4	3	75%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Wilangan**	**88%**	**75%**	**85,23%**	
				Koordinasi Kegiatan Pemberd	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam	2	2	100%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ayan Desa	proses pembangunan di Kecamatan				
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa/Keluraha n Cepat Berkembang**	**90%**	**100%**	**111,11%**	
				Fasilitasi. Rekomen	Jumlah Desa/Kelurahan	4	3	75%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Cepat Berkembang				
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertib	**Persentase penurunan pelanggar**	**Renstra 2024-2026**	**PROGRAM KOORDINASI KETENT**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban**	**10**	**-26,08%**	**-260,8%**	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	an di Wilayah Kecamatan	**an ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan**		**RAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**umum yang ditangani**				
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	1	1	100%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program /Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ketertiban Umum	dan Ketertiban Umum				

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
JalanJenderal Basuki Rakhmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321746 Faks (0358) 321111
www.nganjukkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kuwadi,SH
Jabatan : Camat Prambon
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Handoko Taruna
Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2025

Pihak Kedua

Sri handoko taruna

Pihak Pertama

Kuwadi, SH
Pembina Tk.I
NIP. 196704061989031012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PRAMBON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Publik	90 %
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketrtiban di Wilayah Kecamatan.	Persentase Penurunan pelanggaran ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah Kecamatan.	30 %

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.868.602.231	APBD 2025
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	128.593.900	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	66.687.950	
4,	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	51.955.700	
5.	Program penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum	Rp.	86.545.350	
6.	Pragram pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	246.833.200	
	Jumlah	**Rp.**	3.449.217.331	

Nganjuk, Januari 2025

Pihak Kedua

Sri handoko taruna

Pihak Pertama

Kuwadi, SH
Pembina Tk.I
NIP. 196704061989031012

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
JalanJenderal Basuki Rakhmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321746 Faks (0358) 321111
www.nganjukkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Prawoko,S.STP,M.Si
Jabatan : Camat Prambon

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.Drs.H. Marhaen Djumadi, A. Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A
Jabatan : Bupati Nganjuk

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, September 2025

Pihak Kedua

Dr.Drs.H. Marhaen Djumadi, A. Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A

Pihak Pertama

Wisnu Prawoko,S.STP,M.Si
Pembina
NIP. 19870504 200602 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PRAMBON

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	75,45
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan	90,97
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan .	10
4.	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	90

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.811.784.329	PAPBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.591.369	PAPBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.842.950	PAPBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.055.700	PAPBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.545.350	PAPBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	226.208.200	PAPBD
		3.307.027.898	

Nganjuk, September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI - NGANJUK

Dr.Drs.H. Marhaen Djumadi, A. Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A

Pihak Pertama,
CAMAT - NGANJUK

Wisnu Prawoko,S.STP,M.Si
Pembina
NIP. 19870504 200602 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN PRAMBON

Jl. Panglima Sudirman Nomor 101 Telp.□ (0358)

KEPUTUSAN CAMAT PRAMBON
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 188/01/Kept./ 411.515/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

CAMAT PRAMBON

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sebagai Dasar Pengukuran Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Organisasi.

c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Dan Huruf B, Dipandang Perlu Menetapkan Keputusan Camat Prambon Kabupaten Nganjuk Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Prambon Tahun 2024 - 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4421);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 793);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten

Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 16).

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Camat Prambon Kabupaten Nganjuk Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Kesatu : Keputusan Camat Prambon Kabupaten Nganjuk Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini, Merupakan Acuan Kinerja Yang Digunakan Oleh Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Meliputi :

a. Untuk Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. Menyampaikan Rencana Kinerja Dan Anggaran;
c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; Dan
e. Melakukan Evaluasi Penapaian Kinerja Sesuai Dengan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu, Disusun Dengan Mengacu Kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prambon
Pada tanggal, Januari 2024

CAMAT PRAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN PRAMBON

KUWADI,SH
Pembina TK I
NIP. 19670406198310 12

Lampiran : Keputusan Camat Prambon
Nomor : 188/01/411.515/2024
Tanggal : Januari 2024

Instansi : **KANTOR KECAMATAN PRAMBON**
Visi :
Misi :
Tugas : Melakukan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah dan kemasyarakatan
dalam wilayah kecamatan
Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan,pembinaan,penerapan,penegasan perundang-undangan dan pemenuhan sarana prasarana serta pelaya
nan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PRAMBON
TAHUN 2024-2026

NO	Tujuan	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah penilaian umum yang dilakukan oleh Tim PenilaiKinerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk meliputi : Penilaian Administrasi,Penilaian Presentasi dan Penilaian Tinjau Lapang oleh Tim yang memperhatikan aspek : 1.Aspek Kesejahteraan 2.Aspek Pemberdayaan 3 Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5 Aspek Hukum 6.Aspek PKK	Kecamatan PRAMBON dari Aplikasi SINCAN	Kecamatan PRAMBON

			7.Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan 9.Penanganan Pengaduan ,saran dan masukan Dimana penilaian administrasi dilakukan dengan mengisi kertas kerja penilaian kecamatan melalui aplikasi Sistem Informasi Kerjan Kecamatan (SINCAN) dengan url: satria .ropem.jatimprov.go.id Sedangkan penilaian Tinjau Lapang dilakukan untuk menkonfirmasi dan Validasi administrasi terhadap kertas kerja dan data dukung ysng telah dihimpun		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat diukur melalui survey Kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan Publik. Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi : 1.Persyaratan 2.Prosedur 3.Waktu pelaksanaan 4.Biaya/tariff 5 Produk Specifik jenis pelayanan 6.Kopetensi dari Pelaksana 7.Perilaku dari Pelaksana 8.Maklumat Pelayanan 9.Penanganan Pengaduan ,saran dan masukan Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dikelompkan/dikategorikan sebagai berIKUt: 1. Skor 0 – 40 kategori kurang baik 2. Skor 41 - 60 kategori Cukup baik 3. Skor 61 – 80 kategori Baik 4. Skor 81 – 100 kategori Sangat baik	- Survey Kecamatan PRAMBON dari Aplikasi E SUKMA .JATIM - Survey dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun.	Kecamatan PRAMBON

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang terselesaikan	∑ Pelanggran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun ——————————————— X100 % ∑ Semua Pelanggran ketentraman dan ketertiban umum dalam Satu tahun	Kecamatan PRAMBON	Kecamatan PRAMBON

CAMAT PRAMBON

KUWADI,S.H
Pembina Tk. I
NIP. 19670406198310 12

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN PRAMBON

Jl. Panglima Sudirman Nomor 101 Telp.□ (0358)

KEPUTUSAN CAMAT PRAMBON
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 188/01/Kept./ 411.515/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

CAMAT PRAMBON

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sebagai Dasar Pengukuran Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Organisasi.

c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Dan Huruf B, Dipandang Perlu Menetapkan Keputusan Camat Prambon Kabupaten Nganjuk Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Prambon Tahun 2025 - 2029

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4421);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 793);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten

Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 16).

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Camat Prambon Kabupaten Nganjuk Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Kesatu : Keputusan Camat Prambon Kabupaten Nganjuk Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini, Merupakan Acuan Kinerja Yang Digunakan Oleh Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Meliputi :

a. Untuk Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. Menyampaikan Rencana Kinerja Dan Anggaran;
c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; Dan
e. Melakukan Evaluasi Penapaian Kinerja Sesuai Dengan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu, Disusun Dengan Mengacu Kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prambon
Pada tanggal, 19 September 2025

CAMAT PRAMBON

WISNU PRAWOKO , S.STP , M.Si
Pembina
NIP. 198705042006021001

Lampiran : Keputusan Camat Prambon
Nomor : 188/01/411.515/2025
Tanggal : 19 September 2025

Instansi : **KANTOR KECAMATAN PRAMBON**
Visi :
Misi :
Tugas : Melakukan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah dan kemasyarakatan
dalam wilayah kecamatan
Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan,pembinaan,penerapan,penegasan perundang-undangan dan pemenuhan sarana prasarana serta pelaya
nan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PRAMBON
TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	TUJUAN					
	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	KONSEP : Sinergitas penyelenggaran di kecamatan adalah kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan penyelengaraan trantibum serta perlindungan masyarakat.	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung sesuai indikator penilaian	Camat Prambon

				Definisi Operasional : penilaian Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan difokuskan pada bidang kreativitas yaitu: (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Pelaksanaan Tugas Atributif; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Tata Kelola Kecamatan; dan (5) Inovasi, dan (6)Tugas Lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.		
				Formulasi : Indeks sinergitas kecamatan dihitung dari rata-rata indikator penilaian yang mencakup (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Pelaksanaan Tugas Atributif; (5) Inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian; (6)Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan; (7) Pelaksanaan Tugas Lainnya.		
	SASARAN					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks	Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan unit pelayanan publik di kecamatan. IKM menjadi indikator kinerja utama dalam menilai sejauh mana pelayanan yang diterima sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan standar pelayanan yang ditetapkan.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngetos melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Camat Prambon

				Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).		
				Formulasi : IKM adalah nilai rata-rata untuk komponen (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan; (6) Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (9) Sarana dan Prasarana.		
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	%	Konsep : Ini merujuk pada segala bentuk gangguan atau masalah yang dapat merusak ketertiban dan keamanan di masyarakat, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun emosional. Biasanya, gangguan ini bisa berupa tindakan kriminal, kerusuhan, atau perilaku yang mengganggu kenyamanan dan kelancaran kehidupan sehari-hari warga.	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek dan Koramil	Camat Prambon
				Definis Operasional : Penurunan gangguan trantibum adalah selisih jumlah gangguan trantibum dengan jumlah gangguan trantibum pada tahun sebelumnya.		

				Formulasi : Perbandingan dari jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %		
	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi desa	%	Konsep : Desa tertib administrasi desa adalah kondisi di mana sebuah desa mampu mengelola seluruh kegiatan administratifnya secara rapi, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, desa dianggap tertib administrasi apabila seluruh proses pemerintahan, pengelolaan keuangan, pencatatan, dan pengelolaan data dilakukan dengan sistem yang jelas dan terorganisir dengan baik	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Prambon
				Definisi Operrasional : Desa Tertib Administrasi Desa apabila memenuhi syarat"/kirteria sebagai berikut : Mempunyai dan Mengisi Buku buku : 1.. Administrasi Umum 2. Administrasi Kependudukan 3.Administrasi Keuangan 4 Aministrasi Pembangunan 5 Administrasi Lainnya : a. Buku Administrasi BPD b. Buku Adminstrasi Musyawarah Desa c. Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Adat		

				Formulasi : Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.20.0000/001/2025
SKPD : 7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Prambon

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Prambon									Rp3.315.854.727,00	Rp133.363.604,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.449.218.331,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp3.315.854.727,00	Rp133.363.604,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.449.218.331,00	
7	01				KECAMATAN				Rp3.315.854.727,00	Rp133.363.604,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.449.218.331,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp2.737.083.627,00	Rp131.518.604,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.868.602.231,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp13.661.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.661.250,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.848.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.848.400,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.812.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.812.850,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp2.103.341.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.103.341.333,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.096.404.933,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.096.404.933,00	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.517.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.517.600,00	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.418.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.418.800,00	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp27.285.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.285.200,00	

Dipindai dengan CamScanner

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.000.000,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.285.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.285.200,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp144.283.744,00	Rp4.553.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.837.194,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.893.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.893.850,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.294.350,00	Rp4.553.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.847.800,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp38.346.624,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.346.624,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.011.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.011.600,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.952.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.952.440,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.977.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.977.180,00	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.807.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.807.700,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp3.480.000,00	Rp126.965.154,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.445.154,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp39.465.769,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.465.769,00	

Dipindai dengan CamScanner

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.480.000,00	Rp87.499.385,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.979.385,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp47.185.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.185.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.110.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.075.000,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp397.847.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.847.100,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp59.674.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.674.800,00	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.800.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.800.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp279.572.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.572.300,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp128.593.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.593.900,00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp118.687.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.687.800,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp118.687.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.687.800,00	
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				Rp5.923.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.923.700,00	
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.923.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.923.700,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				Rp3.982.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.982.400,00	

Dipindai dengan CamScanner

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.982.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.982.400,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp64.842.950,00	Rp1.845.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.687.950,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				Rp64.842.950,00	Rp1.845.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.687.950,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.900.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.900.250,00	
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.942.700,00	Rp1.845.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.787.700,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				Rp51.955.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.955.700,00	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				Rp51.955.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.955.700,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp51.955.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.955.700,00	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				Rp86.545.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.545.350,00	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				Rp86.545.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.545.350,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp86.545.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.545.350,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				Rp246.833.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.833.200,00	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				Rp246.833.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.833.200,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp34.998.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.998.900,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp185.034.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.034.200,00	

Dipindai dengan CamScanner

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.800.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.800.100,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.206.851.938,00
Februari	Rp8.198.900,00
Maret	Rp19.247.200,00
April	Rp1.101.052.029,00
Mei	Rp24.632.800,00
Juni	Rp7.845.000,00
Juli	Rp756.950.142,00
Agustus	Rp3.309.100,00
September	Rp6.660.000,00
Oktober	Rp314.471.222,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp3.449.218.331,00**

Nganjuk, Tanggal 02 Januari 2025

CAMAT PRAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN PRAMBON

Kuwadi,SH

NIP. 196704061989031012

Mengesahkan:

PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BPKAD

Dra. DYAH PUSPITARINI, M.SI

NIP. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321746 Fax (0358) 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 14 Agustus 2024

Nomor : 100/2820/411.000/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Tahun 2024

Kepada
Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Nganjuk
Di
NGANJUK

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Hasil Penilaian Administrasi dan Tinjau Lapang Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2024 pada tanggal 26 Juli 2024, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagaimana berikut :

A. Dasar

1. Ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/313/K/411.013/2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.2.2/20089/011.1/2024 tanggal 31 Mei 2024 hal Sinergitas Kinerja Kecamatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

B. Ruang Lingkup

1. Penilaian Administrasi berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) pada hari Jum'at Tanggal 26 Juli 2024.
2. Penilaian Indikator Manajerial berdasarkan kuisioner yang dibagikan kepada ASN di Kecamatan masing-masing dengan ketentuan nilai rata-rata dari hasil kuisioner.

C. Hasil Penilaian

1. Sampai dengan pelaksanaan rapat pleno pada hari Jum'at Tanggal 26 Juli 2024 masih ada indikator yang belum disetujui dikarenakan :
   a. Format data dukung belum sesuai;
   b. Data dukung belum sesuai dengan isian indikator yang dimasukan;
   c. Data dukung belum dilengkapi dengan narasi yang jelas tempat dan tanggal dilaksanakan.
2. Hasil Penilaian Administrasi dan Indikator Manajerial sebagaimana berikut :

NO.	KECAMATAN	SINCAN	PERINGKAT
1.	NGANJUK	86,70	1
2.	SAWAHAN	83,71	2
3.	NGETOS	82,87	3
4.	JATIKALEN	82,63	4
5.	SUKOMORO	79,83	5
6.	PRAMBON	75,45	6
7.	WILANGAN	73,59	7
8.	TANJUNGANOM	73,16	8
9.	LENGKONG	72,87	9
10.	BARON	68,96	10
11.	NGLUYU	64,92	11
12.	PATIANROWO	64,70	12
13.	BAGOR	63,52	13
14.	BERBEK	61,63	14
15.	LOCERET	58,80	15

16.	NGRONGGOT	56,48	16
17.	GONDANG	51,65	17
18.	PACE	50,57	18
19.	REJOSO	50,50	19
20.	KERTOSONO	46,98	20

D. Rekomendasi

1. Hasil Evaluasi Penilaian Administrasi sebagaimana huruf C angka 1 diatas berupa catatan dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) harus ditindaklanjuti oleh Camat paling lambat sebelum Tahun Anggaran 2024 berakhir.
2. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi data dukung kinerja yang berkualitas diharapkan kepada Saudara Camat supaya memerintahkan kepada Pejabat di Lingkungan masing masing agar :
   a. Setiap Pejabat atau yang ditugasi agar memahami tugas, pokok dan fungsi;
   b. Memetakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan;
   c. Tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan agar direncanakan langkah tindak lanjut; dan
   d. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat agar diiput pada isian Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) dan dilengkapi data dukung.
3. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaporkan perbulan oleh penyusun per Tri Wulan (3 bulan) dan di verifikasi oleh Kepala Seksi maupun Kepala Sub Bagian serta dilaporkan oleh Sekretaris Camat dan Camat per semester (6 bulan).
4. Untuk pengisian hasil kinerja Tahun 2024 dapat dilakukan input data pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2025, diharapkan agar Pejabat atau yang ditugasi mulai saat ini setiap hasil kinerja harus discan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. Pj. Bupati nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk, Jawa Timur 64412
Telepon (0358) 323388 Fax (0358) 321111
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 28 November 2025

Nomor : 100/3889/411.000/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Tahun 2025

Kepada
Yth. Camat Se-Kab. Nganjuk
di
N G A N J U K

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Administrasi dan Manajerial Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 pada tanggal 7 November 2025, *maka bersama ini kami sampaikan hal sebagaimana berikut :*

A. Dasar

1. Ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/313/K/411.013/2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

B. Ruang Lingkup

1. Penilaian Administrasi berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) sampai dengan Hari Kamis Tanggal 6 November 2025.
2. Penilaian Indikator Manajerial dari Asisten Pemerintahan dan Kesra.

C. Hasil Penilaian

Hasil Penilaian Administrasi dan Indikator Manajerial sebagaimana berikut :

NO	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Ngetos	90,80	I
2.	Ngluyu	87,08	II
3.	Wilangan	86,47	III
4.	Prambon	85,14	IV
5.	Baron	83,51	V
6.	Sawahan	82,23	VI
7.	Jatikalen	80,45	VII
8.	Nganjuk	80,39	VIII
9.	Berbek	80,28	IX

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10.	Patianrowo	79,78	X
11.	Bagor	79,70	XI
12.	Tanjunganom	78,44	XII
13.	Ngronggot	75,09	XIII
14.	Sukomoro	73,03	XIV
15.	Loceret	72,46	XV
16.	Kertosono	72,02	XVI
17.	Rejoso	71,02	XVII
18.	Gondang	68,09	XVIII
19.	Lengkong	65,40	XIX
20.	Pace	61,87	XX

D. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi data dukung kinerja yang berkualitas diharapkan kepada Saudara Camat supaya memerintahkan kepada Pejabat di Lingkungan masing masing agar:
   a. Setiap Pejabat atau yang ditugasi agar memahami tugas, pokok dan fungsi;
   b. Memetakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan;
   c. Tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan agar direncanakan langkah tindak lanjut; dan
   d. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat agar diiput pada isian Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) dan dilengkapi data dukung.
2. Untuk pengisian Kinerja Kecamatan Tahun 2026 dapat dilakukan input data pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026, diharapkan agar Pejabat atau yang ditugasi mulai saat ini setiap hasil kinerja harus discan. Untuk pemenuhan Capaian Kinerja Renstra Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nganjuk

Nur Solekan

Tembusan :
Bupati Nganjuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Politik													Baik
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	222	86,18	83,78	82,55	81,87	96,06	83,22	86,26	87,95	98,54	83,22	B	Baik
31	Kecamatan Bagor	180	87,69	86,11	84,58	82,92	95,83	83,75	86,11	87,92	96,94	85	B	Baik
32	Kecamatan Baron	350	95,06	93,86	93,5	92,14	98,71	94,86	94,57	95,21	99,36	93,36	A	Sangat Baik
33	Kecamatan Berbek	64	83,33	80,86	76,95	78,13	94,92	78,91	81,25	86,72	94,14	78,13	B	Baik
34	Kecamatan Gondang	205	91,18	90,12	87,44	87,07	97,8	88,05	90,49	92,2	98,05	89,39	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	81	88,07	85,49	83,64	82,41	96,6	84,26	87,04	89,51	97,53	86,11	B	Baik
36	Kecamatan Kertosono	110	91,87	91,36	85,23	87,27	100	88,41	89,77	92,5	100	92,27	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	25	96,89	98	99	98	100	97	97	95	99	89	A	Sangat Baik
38	Kecamatan Loceret	17	86,6	83,82	82,35	83,82	95,59	82,35	83,82	83,82	98,53	85,29	B	Baik
39	Kecamatan Nganjuk	556	87,81	84,53	85,79	83,36	99,91	83,27	82,87	93,12	94,78	82,69	B	Baik
40	Kecamatan Ngetos	16	90,97	84,38	89,06	85,94	98,44	89,06	90,63	90,63	98,44	92,19	A	Sangat Baik
41	Kecamatan Ngluyu	109	86,39	87,39	88,3	85,32	100	81,19	84,86	87,39	84,86	78,21	B	Baik
42	Kecamatan Ngronggot	212	99,7	99,53	99,65	99,41	100	99,53	99,53	99,88	100	99,76	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	317	96,51	94,56	95,5	96,14	97,24	97,08	97,4	96,85	96,77	97,08	A	Sangat Baik
44	Kecamatan Patianrowo	373	94,11	90,68	95,38	91,49	100	92,09	91,55	97,12	100	88,67	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	85	86,41	85	83,24	84,41	94,41	82,94	86,18	88,82	96,76	83,82	B	Baik
46	Kecamatan Rejoso	258	92,66	93,51	91,96	89,15	99,71	90,79	90,21	90,89	99,52	88,18	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	49	89,4	85,2	87,24	81,63	100	86,73	88,27	86,73	98,47	90,31	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Sukomoro	263	94,98	92,68	94,68	93,54	99,62	94,01	94,2	94,87	96,39	94,87	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	141	89,28	86,52	88,12	85,28	97,16	85,28	87,77	89,89	97,87	85,64	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
34	Kecamatan Gondang	29	93,68	92,24	91,38	89,66	98,28	92,24	92,24	93,1	100	93,97	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	19	91,37	82,89	90,79	86,84	100	88,16	92,11	94,74	100	86,84	A	Sangat Baik
36	Kecamatan Kertosono	108	93,16	92,82	90,51	91,67	100	91,44	90,51	92,59	100	88,89	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	21	79,76	77,38	78,57	78,57	90,48	78,57	78,57	80,95	77,38	77,38	B	Baik
38	Kecamatan Loceret	32	86,72	86,72	85,94	85,16	98,44	85,16	85,16	84,38	89,84	79,69	B	Baik
39	Kecamatan Nganjuk	138	89,73	86,41	88,22	85,33	100	84,96	84,78	99,82	93,84	84,24	A	Sangat Baik
40	Kecamatan Ngetos	116	94,2	91,38	93,1	91,81	98,71	93,32	93,32	94,61	98,28	93,32	A	Sangat Baik
41	Kecamatan Ngluyu	144	87,06	83,33	86,11	84,2	100	82,47	82,47	91,84	91,15	81,94	B	Baik
42	Kecamatan Ngronggot	44	99,75	99,43	99,43	99,43	100	99,43	100	100	100	100	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	58	82,14	81,47	81,47	80,6	88,79	79,74	79,74	81,47	87,07	78,88	B	Baik
44	Kecamatan Patianrowo	65	95,34	93,08	94,23	94,23	100	93,08	95	93,85	100	94,62	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	163	99,23	99,08	98,93	99,08	99,54	99,23	99,23	99,39	99,69	98,93	A	Sangat Baik
46	Kecamatan Rejoso	366	90,54	90,16	90,64	87,77	99,73	89,28	88,05	89,28	94,33	85,59	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	51	90,47	88,73	88,24	87,25	96,57	86,76	90,69	90,69	96,57	88,73	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Sukomoro	77	95,92	93,83	94,48	94,81	99,03	96,43	94,81	95,78	98,38	95,78	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	10	86,67	85	85	82,5	97,5	82,5	82,5	85	97,5	82,5	B	Baik
50	Kecamatan Wilangan	55	83,69	83,64	84,55	86,36	83,64	81,82	82,73	83,18	84,55	82,73	B	Baik
51	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	32	83,51	85,16	85,16	75	92,97	83,59	83,59	81,25	85,94	78,91	B	Baik
52	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	103	83,6	75,24	82,77	78,88	97,57	78,64	80,34	81,8	97,33	79,85	B	Baik
IKM KAB. NGANJUK TW IV 2025		**7734**	**90,36**	**88,29**	**89,01**	**86,96**	**97,78**	**88,17**	**89,08**	**90,17**	**96,28**	**87,46**	**A**	**Sangat Baik**

*Sumber data : Aplikasi Sukma e-jatim (*https://sukma.jatimprov.go.id*)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PRAMBON
JalanPanglimaSudirmanNomor 101 PrambonKodePos 64484
Telepon(0358) 791346 Faks (0358) 791346
E-mail : prambon@nganjukkab.go.id

DATA KEJADIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2024 DAN 2025 DI KECAMATAN PRAMBON TRIBULAN III

No	DATA	TAHUN	
		2024	**2025**
1	CURAS (Pencurian dengan Kekerasan)	-	-
2	CURAT (Pencurian dengan Pemberatan)	-	-
3	CURINGAN (Pencurian Ringan)	1	1
4	CURANMOR (Pencurian Kendaraan Bermotor)	-	-
5	CURHEWAN (Pencurian Hewan)	-	-
6	KEBAKARAN	3	3
7	PENJAMBRETAN	-	-
8	ANIAYA RINGAN	-	3
9	PENGEROYOKAN	-	-
10	PEMBUNUHAN	-	-
11	PENGRUSAKAN	-	-
12	MIRAS	45	15
13	TIPU GELAP	-	-
14	JUDI	-	-
15	NARKOBA	-	-
16	PEMERASAN	-	-
17	LAIN-LAIN	9	5
JUMLAH		58	27

CAMAT PRAMBON

WISNU PRAWOKO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 198705042006021001

Mengetahui,
KAPOLSEK PRAMBON

KOMPOL SANTOSO, SH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DATA KEJADIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TAHUN 2024 DAN 2025 DI KECAMATAN PRAMBON

No	DATA	TAHUN 2024	TAHUN 2025
		2024	2025
1	CURAS (Pencurian dengan Kekerasan)	-	-
2	CURAT (Pencurian dengan Pemberatan)	-	-
3	CURINGAN (Pencurian Ringan)	1	1
4	CURANMOR (Pencurian Kendaraan Bermotor)	-	-
5	CURHEWAN (Pencurian Hewan)	-	-
6	KEBAKARAN	3	3
7	PENJAMBRETAN	-	-
8	ANIAYA RINGAN	3	-
9	PENGEROYOKAN	-	-
10	PEMBUNUHAN	-	-
11	PENGRUSAKAN	-	-
12	MIRAS	30	45
13	TIPU GELAP	-	-
14	JUDI	-	-
15	NARKOBA	-	-
16	PEMERASAN	-	-
17	LAIN-LAIN	9	9
JUMLAH		46	58

CAMAT PRAMBON

WISNU PRAWOKO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 198705042006021001

Mengetahui,
KAPOLSEK PRAMBON

KOMPOL SANTOSO, SH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PRAMBON
Jalan Panglima Sudirman Nomor 101 Prambon Kode Pos 64484
Telepon (0358) 791346 Faks (0358) 791346
E-mail : prambon@nganjukkab.go.id

LAPORAN

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI TERTIB ADMINISTRASI DESA

A. Pendahuluan

1. Umum/Latar Belakang

   Dalam rangka menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya tertib administrasi desa dengan indikator sasaran Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%), maka dengan dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Prambon, diharapkan dapat membantu dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

2. Landasan Hukum

   a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
   b. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9.
   c. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

3. Maksud dan Tujuan

   Untuk melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Prambon.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

   Membuat laporan dan/atau dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Prambon.

C. Hal Yang Dicapai

   Data Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Desa sejumlah 14 (Empat Belas) Desa

D. Kesimpulan dan Saran

   Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian bukti dukung pada kegiatan Monitoring

dan Evaluasi Administrasi Desa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Prambon pada Tahun 2025, terhadap 14 (Empat Belas) desa, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Desa	Buku Administrasi yang terisi				Jumlah	Nilai	Kategor
		Administrasi Umum Desa	Administrasi Kependudukan	Administrasi Keuangan	Administrasi Pembangunan			
1	Gondanglegi	8	4	6	4	22	91.6%	Sangat Tertib
2	Singkalanyar	9	5	6	4	24	100%	Sangat Tertib
3	Mojoagung	9	5	6	4	24	100%	Sangat Tertib
4	Bandung	9	5	6	4	24	100%	Sangat Tertib
5	Baleturi	9	5	6	4	24	100%	Sangat Tertib
6	Nglawak	8	4	6	4	22	91.6%	Sangat Tertib
7	Rowoharjo	9	5	6	4	24	100%	Sangat Tertib
8	Sugihwaras	9	5	6	3	23	95.8%	Sangat Tertib
9	Tegaron	8	5	6	4	23	95.8%	Sangat Tertib
10	Tanjungtani	9	5	6	4	24	100%	Sangat Tertib
11	Sanggrahan	9	4	6	4	23	95.8%	Sangat Tertib
12	Watudandang	9	3	5	3	20	83.3%	Tertib
13	Sonoageng	9	4	6	3	22	91.6%	Sangat Tertib
14	Kurungrejo	9	4	6	4	23	95.8%	Sangat Tertib
Total						322	95.83 %	Sangat Tertib

Dari data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 14 (Empat belas) desa, hanya ada 1 (Satu) desa dengan Kategori Tertib Administrasi Desa, sedangkan desa yang lain 13 (Tiga Belas) desa memperoleh kategori Desa Sangat Tertib Administrasi. Sehingga total perolehannya adalah sebesar 95.83%.

Sedangkan berdasarkan rata-rata nilai, maka tingkat ketertiban administrasi desa di wilayah Kecamatan Prambon menunjukkan hasil yang Sangat baik dengan nilai rata-rata 95.83%, dengan mayoritas desa telah memenuhi sebagian besar komponen Administrasi Umum, Kependudukan, Keuangan, dan Pembangunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada aspek:

- Kelengkapan Buku Lembaran Desa dan Berita Desa.
- Kesesuaian administrasi kependudukan dengan data SIAK.

Dengan adanya pembinaan dan tindak lanjut dari tim penilai Kecamatan, diharapkan seluruh desa di Kecamatan Prambon dapat meningkatkan kualitas pengelolaan

administrasi pada tahun-tahun berikutnya dan seluruh desa dapat mencapai kategori Desa Sangat Tertib Administrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

E. Penutup

Demikian laporan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

CAMAT PRAMBON,

WISNU PRAWOKO, S.STP, M.SI
Pembina
NIP. 19870504 2006 02 1 001

Lampiran Bukti Dukung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	4	5			8	https://s.id/LKJIP2025KECPRAMBON
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Renstra 2025-2029			75,45	85,14	112,84%	
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu	Renstra 2025-2029	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP Kecamatan	81	73,05	90,18%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan (PATEN)	**Kecamatan (PATEN)**		**KABUPATEN/KOTA**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	3	100%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31	31	100%	
				Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	1	50%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perangkat Daerah					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	5	5	0%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	3	75%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintahan Daerah					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	39	30	76,92%	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**90,97%**	**92,86%**	**102,08%**	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PELAYANAN PUBLIK					
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	9	75%	
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana	12	6	50%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4	3	75%	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Wilangan**	**88%**	**75%**	**85,23%**	
				Koordinasi Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses	2	2	100%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemberdayaan Desa	pembangunan di Kecamatan				
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**90%**	**100%**	**111,11%**	
				Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	4	3	75%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintahan Daerah					
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	**Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**10**	**-26,08%**	**-260,8%**	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1	100%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ketertiban Umum					